

## STUDI KOMPARATIF SISTEM PEMERINTAHAN KERAJAAN GOWA DAN BONE DALAM PERSPEKTIF OTONOMI DAERAH

Rusli Malli<sup>1a)</sup>; Muhammad Yahya<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Muhammadiyah Makassar

<sup>a)</sup>E-mail: [rusli@unismuh.ac.id](mailto:rusli@unismuh.ac.id)

### Abstract

*The research objectives were to: (1) study the government system during the Kingdom of Gowa, (2) to study the government system during the Kingdom of Bone, and (3) to compare the government system between the Kingdom of Gowa and the Kingdom of Bone as well as to compare the regional autonomy government system adopted by Indonesia today. . There are two methods used in this research, namely: (1) location survey and interviews, and (2) literature study, which is to collect a number of references that discuss the government system in the two kingdoms, namely the Kingdom of Gowa and the Kingdom of Bone both in book form and in the form of research results. thesis, thesis, and dissertation as well as historical journals. In addition, read the references that discuss the regional government system as a reference for comparison. Based on the results of the study and analysis, this study concludes as follows: (1) the government system of the Kingdom of Gowa initially adopted a desantralistic system because salapang bate has the right and authority to regulate its respective regions or countries, while paccallaya only functions as a coordinative. However, after the Kingdom of Gowa was ruled by Tomanurung as the King who had the title of sombaya, the bate salapang system from the ruler of the country turned into servants, and tended to be centralistic, (2) while the government system of the Kingdom of Bone adopted a centralistic system because mapai as the head of government did not give power to adat pitue as an official at the gallarrang or matoa-matoa level in each country and power is directly controlled by the mapai as king, and (3) the results of the study conclude that the governmental system of the Kingdom of Gowa was originally identical to the desantralistic government system that we know as the current regional autonomy system. , meanwhile, the government system of the Bone Kingdom was identical to the centralized government system that was applied during the New Order era.*

**Keywords:** Comparative; Centaralistic government system; Decentralized

### Abstrak

*Tujuan penelitian untuk: (1) mengkaji sistem pemerintahan pada masa Kerajaan Gowa, (2) mengkaji sistem pemerintahan pada masa Kerajaan Bone, dan (3) membandingkan sistem pemerintahan antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone sekaligus membandingkan sistem pemerintahan otonomi daerah yang dianut Indonesia saat ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada*

dua yaitu: (1) survei lokasi dan wawancara, dan (2) studi pustaka yaitu mengumpulkan sejumlah referensi yang membahas sistem pemerintahan pada kedua kerajaan yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk hasil penelitian skripsi, tesis, dan disertasi serta jurnal-jurnal sejarah. Selain itu membaca referensi yang membahas tentang sistem pemeritah daerah sebagai referensi pembanding. Berdasarkan hasil kajian dan analisis maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: (1) sistem pemerintahan Kerajaan Gowa pada awalnya menganut sistem desantralistik karena bate salapang mempunyai hak dan kewenangan mengatur daerahnya atau negerinya masing-masing, sedangkan paccallaya hanya berfungsi sebagai koordinatif. Namun setelah Kerajaan Gowa diperintah oleh Tomanurung sebagai Raja yang bergelar sombaya, maka sistem bate salapang dari penguasai negeri berubah menjadi pengabdi, dan cenderung bersifat sentralistik, (2) sedangkan sistem pemerintahan Kerajaan Bone menganut sistem sentralistik karena mangkau sebagai pucuk pimpinan pemerintahan tidak memberika kuasa kepada adat pitue sebagai pejabat pada tingkat gallarrang atau matoa-matoa pada setiap negeri dan kekuasaan dikendalikan langsung oleh mangkau sebagai raja, dan (3) hasil kajian menyimpulkan bahwa sistem pemerintahan Kerajaan Gowa pada awalnya identik sistem pemerintahan desantralistik yang kita kenal dengan sistem otonomi daerah saat ini, sedangkan sistem pemerintahan Kerajaan Bone identik dengan sistem pemerintahan sentralistik yang diterapkan pada masa orde baru

**Kata Kunci:** *Komparatif; sistem pemerintahan sentaralistik; desentralistik*

## **PENDAHULUAN**

Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah di Indonesia pada masa dahulu mempunyai beberapa kerajaan baik pada masa pra-sejarah maupun pada masa sejarah. Kerajaan pra-sejarah atau masa purba adalah kerajaan yang berdiri sebelum mengenal tulisan atau pada episode pasca tomanurung jilid satu, sedangkan kerajaan pada masa sejarah atau kerajaan yang berdiri setelah tomanurung jilid dua yaitu sekitar pada awal abad ke 14 atau hampir secara bersamaan lahirnya nusantara (1365) yang dikemukakan Mpu Tantular dalam bukunya yang berjudul "Suta Soma" yang di dalamnya pertama kali ditemukan kata Bhinneka Tunggal Ika yang kemudian dijadikan sebagai sombayang negara Republik Indonesia

Di Sulawesi Selatan terdapat beberapa kerajaan purba yang pernah berdiri pada episode Tomanurung jilid satu di antaranya Kerajaan Luwu yaitu dari Patotoe, Batara Gurum Batara Lattu, Sawerigading, Lagaligo, dan Latenritatta yang mengakhiri episode tomanurung jilid satu, Kerajaan Siang Kecamatan Bungoro di Pangkep, Kerajaan Bantaeng yang salah satu rajanya bernama Matturaga kakek daripada Karaeng Bayoa dan Lakipadada, dan Kerajaan Gowa (Hadimuliono dan Muttalib1979). Dalam lontarak disebutkan bahwa sebelum datangnya tomanurung bainea di Takabasia bukit Tamalate

yang kemudian menjadi Raja Gowa pertama yang bergelar sombaya, sudah pernah terbentuk kerajaan Gowa purba yang rajanya disebutkan empat yaitu: (1) Batara Guru, (2) saudara Batara Guru tidak diketahui nama aslinya, (2) Ratu Sapu atau Marancai, dan (4) Karaeng Katangka juga tidak diketahui nama aslinya (Limpo et al. 1995). Keempat raja tersebut, tidak diketahui asal usulnya, juga tidak diketahui bagaimana sistem pemerintahannya, yang diketahui pemerintahan Kerajaan Gowa pada masa purba ini tidak mampu mengatasi konflik yang terjadi di mana-mana.

Episode kerajaan purba ini perlahan merosok akibat terjadi bencana alam yang diikuti terjadinya konflik baik secara vertikal maupun secara horizontal, otoritas kerajaan purba tidak mampu mengatasi konflik yang berkepanjangan, di Luwu terjadi kemarau tujuh generasi sehingga terjadi kelaparan dan kekacauan, Gowa dan Bone terjadi konflik yang disebut dalam lontarak sikanre jukuku tauwa (Makassar) sikanre bale tauwe (Bugis) karena krisis kepemimpinan kejujuran dan keadilan tidak lagi ditegakkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kondisi demikian turunlah tomanurung pada berbagai daerah di Sulawesi Selatan sebagai juruh selamat untuk mengakhiri konflik yang berkepanjangan yang melanda hampir semua daerah di Sulawesi Selatan. Kerajaan purba berakhir dengan hadirnya para tomanurung jilid dua pada berbagai daerah di Sulawesi Selatan, di antaranya tomanurung di Luwu yang namanya Simpuru Siang dan menjadi Raja pertama di Luwu yang bergelar payung, tomanurung di Gowa biasa disebut tomanurung bainea yang menjadi Raja Gowa pertama yang bergelar sombaya, tomanurung di Bone yang menjadi Raja pertama Bone yang bergelar mangkau dan tomanurung lainnya seperti di Kajang, di Soppeng, di Wajo, di Tator. Konsepsi kehadiran tomanurung pada berbagai daerah di Sulawesi Selatan bahkan di benua lain pada prinsipnya sama yaitu untuk memulihkan konflik-konflik terjadi yang merusak peradaban manusia.

Berdirinya suatu kerajaan yang berdaulat untuk menjalankan roda pemerintahan paling tidak ada beberapa hal yang menjadi syarat: (1) mempunyai wilayah kekuasaan atau otonomi, (2) ada rakyat atau penduduk, (3) ada raja atau pemerintah, dan (4) ada peraturan atau regulasi untuk mengurus kerajaan tersebut. Bertitik tolak dari syarat berdirinya suatu kerajaan atau negara yaitu adanya aturan atau regulasi untuk mengatur sistem kerajaan apakah menggunakan sentralistik, desentralistik atau menggunakan gabungan antara sentralistik dan desentralistik yang biasa disebut Co management (Satria, 2003).

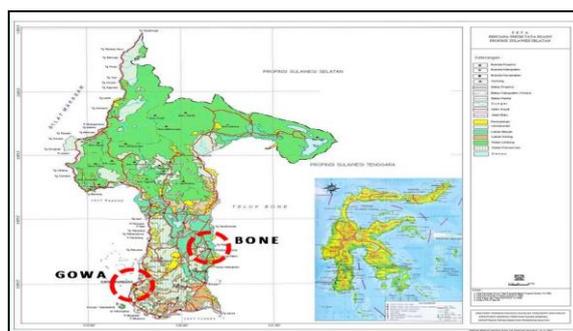
Hubungan kerajaan Gowa dan Bone dalam kehidupan politik di Sulawesi Selatan pada dasarnya di bangun secara kekeluargaan. Itulah sebabnya sering berlangsung perkawinan politik antara satu kerajaan

dengan kerajaan lainnya. Bahkan beberapa kerajaan berniat pula membangun persekutuan dengan cara mengikat perjanjian untuk saling membantu dalam menghadapi lawan dari luar. Ikatan persaudaraan akhirnya membentuk satu konfederasi kerajaan-kerajaan. Dalam hubungan inilah hingga suatu upacara kenegaraan seperti upacara pelantikan dan upacara pernikahan seorang putra mahkota kerajaan tampak dihadiri kerajaan-kerajaan yang menjalin persekutuan dipandang upacara itu belum sempurna. (Walasuji, 2019).

## **METODE**

Penelitian ini dilaksanakan selama dua tahun yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2019. Sedangkan lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bone seperti disajikan pada Gambar 1. Secara geografis Sulawesi Selatan terletak pada 0°12'-8° Lintang Selatan dan 116°48'-122°36' Bujur Timur. Luas wilayahnya 45.764,53 km<sup>2</sup> yang tersebar pada 24 kabupaten/kota dengan batas sebagai berikut: sebelah utara dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, Sebelah perairan Teluk Bone, sebelah Laut Flores dan sebelah Barat Selat Makassar.

Apabila ada rumus-rumus statistika yang digunakan sebagai bagian dari metode penelitian, sebaiknya rumus yang sudah umum digunakan tidak ditulis. Misalnya ada ketentuan spesifik yang ditetapkan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan dan menganalisis data penelitian dapat dijelaskan pada bagian metode ini. Penulis disarankan menyampaikan sumber rujukan atas metode yang digunakan.



Gambar 1. Peta lokasi penelitian yaitu Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bone, Sulawesi, Selatan, Indonesia

Alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pulpen, pensil, spidol, mistar, koreksian pen, staples, peta Sulawesi Selatan, kamera handpone, printer, laptop, note book, papan alas. Sedangkan bahan digunakan dalam penelitian ini berupa kertas, kusioner, tinta printer, beberapa buku sejarah

yang membahas Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Teknik pengambilan data yaitu, untuk data primer melalui wawancara dengan memilih responden yang mempunyai keterkaitan kompetensi keilmuan tentang sejarah Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone. Sedangkan untuk data sekunder digunakan beberapa buku sejarah yang membahas tentang Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, data yang diperoleh dideskripsikan untuk menggambarkan perbandingan sistem pemerintahan Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone, selanjutnya hasil perbandingan sistem pemerintahan kedua kerajaan dibandingkan dengan sistem pemerintahan saat ini untuk Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bone.

## **PEMBAHASAN**

Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah provinsi di Indonesia yang memiliki beberapa kerajaan pada masa sebelum kemerdekaan, baik kerajaan besar maupun kerajaan kecil yang tersebar pada empat etnis di Sulawesi Selatan yaitu Bugis, Makassar, Mandar dan Toraja. Khusus kerajaan besar yaitu Kerajaan Luwu, Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone (Mukhlis dan Robinson, 1985). Dari tiga kerajaan besar yang menjadi kajian pada tulisan ini yaitu Kerajaan Gowa mewakili suku Makasar dan Kerajaan Bone mewakili suku Bugis. Kedua kerajaan ini berdiri hampir secara bersamaan yaitu pada awal abad ke 14 (Limpo, 1995, dan Mattulada, 1985).

Kedua kerajaan ini pada awal berdirinya masing-masing diperintah oleh tomanurung yaitu: (1) tomanurung baine di Gowa sekaligus menjadi Raja Bone pertama yang bergelar sombaya, dan (2) tomanurung di Matajang Bone sekaligus menjadi Raja Bone pertama yang bergelar mangkaue. Pada awal berdiri kedua kerajaan ini berdiri sama-sama berdaulat dan berhak mengatur pemerinta-hannya masing-masing sesuai bhinneka tunggal ika yang mengawal berdirinya nusantara. Kedua kerajaan ini berbeda sistem sistem pemerintahan yang sesuai adat istiadat yang sudah menjadi kearifan lokal masing-masing.

### **1. Kerajaan Gowa**

Secara hirarki Kerajaan Gowa mempunyai level pemerintahan yaitu: (1) Bate Salapang pada tingkat gallarrang, (2) Paccallaya sebagai koordinator atau penghubung antara bate salapang dengan sombaya, dan (3) sombaya sebagai pucuk pimpinan. Untuk lebih jelasnya bagaimana hubungan antara tiga pejabat dalam lingkungan Kerajaan Gowa seperti yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Bate Salapang

Kerajaan Gowa sebelum kehadiran Tomanurung, sudah terbentuk suatu kerajaan yang dinamakan kerajaan purba, dengan hirarki pemerintahan terdapat sembilan gallarrang atau biasa disebut bate salapang sebagai penguasa masing-masing negeri. Adapun kesembilan bate negeri yaitu: (1) Tombola, (2) Lakiung, (3) Saumata, (4) Parang-Parang, (5) Data, (6) Agang Je'ne, (7) Bissei, (8) Kalling, dan (9) Sero. Bate artinya panji atau bendera, sedangkan salapang artinya sembilan, dengan demikian apabila bate diterjemahkan secara harfiah berarti sembilan panji atau bendera yang melembangkan negeri masing-masing (Sagimun, 1986)

Kesembilan negeri ini membentuk sebuah gabungan atau federasi, dan setiap negeri memiliki penguasa-penguasa atau kepala-kepala kaum yang mungkin setingkat dengan gallarrang atau distrik ketika itu, atau setingkat desa atau camat saat ini. Kepala-kepala kampung pada sembilan negeri masing-masing berkuasa penuh mengatur pemerintahannya dalam negeri masing-masing. Demikianlah hirarki pemerintahan di Gowa sebelum diperintah Tomanurung. Dalam kondisi demikian kesembilan negeri sering terjadi konflik horizontal antara kampung dengan kampung yang disebut dalam lontarak sikanre jukuku tauwa, dalam situasi demikian paccallaya sebagai ketua federasi bate salapang mengadakan perundingan untuk mengangkat penguasa atau raja yang dapat mengatasi konflik yang berkepanjangan tersebut.

b. Paccallaya

Hirarki atau level yang kedua adalah paccallaya, sebagaimana telah disinggung sedikit pada sebelumnya bahwa paccallaya suatu lembaga yang merupakan ketua gabungan bate salapang, sebenarnya secara analisis paccallaya tidak merupakan bagian dari level sistem pemerintahan Kerajaan Gowa, oleh karena tidak memiliki otoritas secara langsung dengan masyarakat atau penduduk, jabatan paccallaya saat ini identik dengan jabatan legislatif, dia tidak memiliki hirarki secara langsung dengan masyarakat, sekalipun anggota legislatif dipilih langsung oleh masyarakat.

Jabatan paccallaya sebelum kehadiran tomanurung di Gowa, sebagai ketua federasi bate salapang sebagai garis koornatif, dan bukan garis komando karena bate salapang tau kasuwang salapang memiliki hak masing-masing untuk mengatur negerinya sendiri. Jabatan paccallaya dalam konteks kekinian identik dengan jabatan ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPRI) sebelum reformasi yang tugas utamanya memilih dan melantik Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia,

demikian salah satu tugas paccallaya memilih dan mengangkat Raja Gowa yang bergelar Sombaya.

c. Sombaya

Sebagaimana telah disinggung pada bagian depan bahwa sebelum kehadiran tomanurung di Tammalate, Kerajaan Gowa dilanda konflik berkepanjang, perang antara kampung dengan kampung meletus setiap, sehingga terjadi hukum rimba saling bunuh membunuh yang dikenal dalam *lontara sikanre jukui tauwa*, yang kuat memakan yang lemah dan seterusnya keamanan tidak dapat dikendalikan oleh bate salapang bersama paccallaya sebagai ketua federasi terjadi krisis kepemimpinan karena keadilan dan kejujuran sulit diaplikasikan dalam segala aktivitas kehidupan, mungkin identik dengan kondisi Indonesia saat ini, keadilan dan kejujuran cenderung diperjualbelikan.

Dalam kondisi demikian terdengarlah berita kalau Takabassia Bukit Tammalate turun seorang putri cantik dari kayangan, ketika masyarakat datang beramai-ramai menyaksikan sambil bertanya siapa nama dari mana asalnya tuan putri, namun beliau menjawab dengan nada wibawa bahwa saya tidak tahu dari mana asal usul saya, mungkin kehendak dewatalah sehingga saya ada di sini. Dengan tersebarnya berita ini ke seluruh penjuru masyarakat Gowa, akhirnya paccallaya dan bate salapang datang menemui tuan putri dan memohon kepada tomanurung agar tuan putri bersedia menjadi raja kami.

Terjadilah dialog antara paccallaya bate salapang mewakili masyarakat dengan tomanurung untuk membuat perjanjian, ketika tomanurung mengiyakan bersedia jadi Raja Gowa yang lagi membutuhkan figur pemimpin sebagai juru selamat, maka paccallaya bersama bate salapang serentak berseru kepada masyarakat yang berkumpul, *sombaya karaengnu to Gowa* pada saat itulah pertama kali terucapkan kata *somba* dan menjadi gelar secara turun-temurun bagi yang bertahta sebagai Raja Gowa, maka resmilah tomanurung bainea menjadi Raja Gowa pertama yang bergelar *sombaya*, mulai tomanurung sebagai raja pertama (1320-13450 sampa Andi Idjo Daeng Mattawang Karaeng Laloang Sultan Muhammad Abdul Kadir Aidid sebagai raja terakhir yaitu ke 36 dan sekaligus sebagai bupati pertama (1946-1960). Adapun perjanjian antara masyarakat Gowa dengan tomanurung yaitu “

Atas kesepakatan kedua boleh pihak, maka diangkatlah tomanurung menjadi Raja Gowa pertama yang bergelar *sombaya*. Dengan diangkatnya tomanurung menjadi Raja Gowa pertama, maka sistem pemerintahan di Kerajaan Gowa mengalami perubahan, demikian pula kedudukan dan wewenang paccallaya dan bate salapang, kini federasi Kerajaan Gowa yang

terdiri dari sembilan gallarrang menjadi sebuah kerajaan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang ratu yang menjadi penguasa tunggal di wilayah Kerajaan Gowa, dan kesembilan gallarrang sebagai penguasa negeridi wilayah masing-masing. kini hanya menjadi kasuwiang salapang artinya sembilan orang pengabd. Kemudian lembaga ini berubah menjadi adat sembilan, dari penjelasan ini dengan resminya Kerajaan Gowa menjadi kerajaan berdaulat yang diperintah seorang tomanurung, maka sistem pemerintahan kerajaan Gowa cenderung bersifat sentralistik (Sagimun, 1986 dan Syahrul et al. 1995)

Setelah tomanurung bainea resmi menjadi Raja Gowa, maka paccallaya dan batae salapang bersama masyarakat Gowa membangun istana di atas Bukit Tamalate dalam sehari selesai, sejak itu istilah Tammalate mulai digunakan, tamma artinya tidak sedangkan late artinya layu, dengan demikian dapat diartikan tammalate artinya tidak layu, kata Tammalate muncul karena kayu-kayu yang ditebang untuk keperluan pembangunan istana, belum layu daunnya istana sudah berdiri dan langsung ditempati oleh Raja Gowa, sejak itu Bukit Tammalate menjadi ibukota Kerajaan Gowa dari somba 1 sampai somba ke 9 (1320-1546).

Dengan selesainya istana Raja Gowa, bukan berarti sudah selesai pekerjaan paccallaya dan bate salapang bersama masyarakat Gowa, sudah mulai memikirkan siapa kira-kira yang menggantikan baginda, sekiranya tidak berketurunan. Oleh karena itu, sepakatlah masyarakat Gowa untuk mencari calon suami, pucuk dicinta ulang tiba terdengar ada dua orang bersaudara atau sekawan yang satu bernama karaeng Bayoa dan yang satunya bernama Lakipadada, Karaeng Bayoa memperistrikan tamanurung dan melahirkan seorang putra tunggal yang bernama Tumasalangga Barayang yang kemudian menggantikan ibunya menjadi Raja Gowa yang ke 2 (1345-1370), sedangkan Lakipadada mengembara pada berbagai daerah Bugis dan terakhir kawin mawin di Tator itulah sebabnya Tator dinamakan bumi Lakipadada.

## 2. Kerajaan Bone.

Secara hirarki Kerajaan Bone berbeda dengan Kerajaan Gowa, struktur dan hirarki pemerintahan Kerajaan Bone lebih praktis, pada awalnya pada tingkat desa atau distrik hanya raja-raja kecil yang mengepalai suatu kampung atau negeri, namun tidak bertahan lama dan digantikan dengan sistem adat pitue yang terdiri dari beberapa matoa kemudian digabung atau diikat ke dalam suatu ikatan besar yang disebut kawerrang. Adapun hirarki atau struktur Kerajaan Bone yaitu (1) para matoa sebagai pembantu raja, dan (2) sebagai raja yang bergelar mangkau, definisi operasional tentang adat

pitue dan mangkau seperti yang akan diuraikan berikut ini.

a. Adat Pitue

Sebelum lahirnya Tomanurung di Bone, sudah ada beberapa kerajaan kecil berdiri yaitu Awangpone, Pattiro, Cina, Palakka, dan kerajaan kecil lainnya. Selain kerajaan kecil tersebut di atas, juga di sekitar Watampone terdapat tujuh matoa yang menjadi pembantu utama Kerajaan Bone. Adapun ketujuh matoa yaitu: (1) Matoa Ujung, (2) Matoa Pongeng, (3) Matoa Ta, (4) Matoa Tibajong, (5) Matoa Macege, (6) Matoa Tanete Riattang, dan (7) Matoa Tanete Riawang. Ketujuh matoa ini dalam perkembangannya berubah menjadi ade' Pitu, kemudian dihimpun dan dipusatkan ke dalam Kerajaan Bone (Rahim, 1992). Oleh karena itu, maka tempat berdirinya istana Kerajaan Bone sebagai ibukota disebut Kawerang. Padi yang baru dipanen diikat-ikat kecil lalu disatukan kedalam satu ikatan besar itulah disebut kawerrang, begini bentuk Kerajaan Bone yang menganut sisten sentralistik, berbeda dengan bate salampang pada Kerajaan Gowa yang menganut sistem desentralistik.

b. Mangkau

Pada masa kerajaan kecil dan matoa Kerajaan Bone juga dilanda konflik yang berkepanjangan seperti yang dialami Kerajaan besar lainnya yaitu Kerajaan Luwu dan Kerajaan Gowa. Konflik pada Kerajaan Bone disebutkan dalam lontara sianre bale tauwe berlaku hukum rimba yang kuat memakan yang lemah. Dalam kondisi demikian tiba-tiba masyarakat Bone ribut dengan hadirnya seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan dianggapnya sebagai tomanurung, lalu meminta untuk Raja Bone yang lagi krisis kepemimpinan, namun beliau mengatakan dirinya bukan raja, dan kalau memang masyarakat Bone menghajatkan untuk menjadi raja, dia mempunyai raja, lalu dia mengantar orang banyak ke tempat yang dimaksud.

Ternyata apa yang dimaksud orang putih tersebut, benar adanya begitu sampai di tempat yang dimaksud secara bersamaan kilat menyambar-nyambar, lalu mereka melihat tomanurung sedang duduk di atas sebuah batu datar, berpakaian serba kuning (sanging ridi). Maka sepatatlah masyarakat Bone mengangkat beliau sebagai rajanya, tentang hak dan kewajiban telah digariskan oleh mereka yang berbunyi "kehendakmu adalah kehendak kami, perintahmu kami akan taati, tuan memanggil, kami datang, tuan meminta, kami memberi, tuan berseru kami menjawab, akan tetapi tuan menjaga kami, seperti menjaga padi di sawah agar tidak dimakan burung pipit, tuan melindungi kami diselimuti agar kami tidak kedinginan, tuan memimpin kami. Begitu selesai janji dan amanat diucapkan.

Tomanurung menyambut dengan mengucapkan kunjung ke atas batok kepalaku kata-kata kalian itu, kuletakkan amanat yang mulia itu di atas singgasana keemasan pada waktu kalian ambulo sebatang, disebabkan kehendak kalian itulah, maka aku menjadi raja. Setelah selesai pengucapan perjanjian antara masyarakat dan Tomanurung, maka segeralah masyarakat membangunkan langkana atau istana yang disebut mangkau, itulah sebabnya siapa yang menjadi Raja Bone secara otomatis bergelar mangkau, berarti Mangkau di Bone, Somba di Gowa adalah gelar jabatan, bukan gelar keturunan atau kebangsawanan (Rahman, 1992). Demikian juga pada Kerajaan Kajang, karaeng bersifat tumbuhan kelapa tidak seperti tumbuhan pisang, artinya karaeng bagi Kerajaan Kajang adalah gelar tidak bersifat keturunan, ambaiji barumbunga (yang bertahta saja dipanggil karaeng, keturunannya termasuk anak-anaknya tidak berhak dipanggil karaeng, bertahta juga sebagai Karaeng Kajang (Sambu, 2016).

Tomanurung di Matajang menjadi pertama yang bergelar mangkau dari tahun (1300-1370), dan menikah dengan manurunge ri Toro dan memperoleh lima orang anak seorang diantaranya bernama Laummase menggantikan ayahnya menjadi Raja Bone ke 2 (1370-1398). Seorang adik perempuan Laummase yang bernama La Pattanrawanua diperistrikan oleh La Pattikkeng Arung di Palakka dan melahirkan anak yang bernama Lasaliu, dan beliau ini menggantikan pamannya Laummase sebagai Raja Bone ke 3 (1398-1470), karena Laummase sebagai Raja kedua tidak berketurunan. Lasaliu ini berambut tegak lurus sehingga diberi Kerrampulue, dalam usianya baru sehari sudah dilantik menjadi Raja Bone ke 3 dan bertahta selama 74 tahun. Demikianlah sejarah singkat Kerajaan Bone yang diperintah raja sebanyak 30 orang sebagai Raja Bone Terakhir ialah La Pawawoi Karaeng Segeri memerintah dari tahun 1895-1905 yang pada akhir pemerintahan disebut rumpu'na Bone dan beliau diasingkan ke Jawa, sehingga beliau mendapat gelar mattinroi di Badung 17 Januari 1911.

### 3. Sistem Pemerintahan.

Sejak Indonesia merdeka kedua daerah bekas kerajaan besar yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone sama-sama kedudukannya sebagai daerah tingkat dua dan di bawahi oleh gubernur sebagai kepala daerah dan kepala pemerintahan pada level provinsi yang membawa beberapa daerah kabupaten/kota.

#### a. Kabupaten Gowa.

Setelah Indonesia merdeka selama 74 tahun sudah beberapa kali mengalami penambahan atau pemekaran kecamatan dan hingga saat ini Kabupaten Gowa (2019) sudah memiliki 18 kecamatan yang terbagi atas

beberapa desa dan kelurahan. Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten di Indonesia yang menjadi percontohan Otonomi Daerah (OTODA) sejak tahun 2001. Setelah itu Kabupaten Gowa resmi menerapkan otonomi daerah menerapkan sistem desentralistik, gubernur atau pemerintah provinsi hanya bersifat koordinatif kepada daerah kabupaten/kota.

b. Kabupaten Bone.

Demikian juga Kabupaten Bone sejak Indonesia merdeka selama 74 tahun sudah beberapa kali mengalami penambahan atau pemekaran kecamatan dan hingga saat ini Kabupaten Bone (2019) sudah memiliki 27 kecamatan yang terbagi atas beberapa desa dan kelurahan. Bahkan Kabupaten Bone sudah beberapa kali diusulkan akan dimekarkan, namun hingga saat ini belum juga terealisasi dan mungkin hanya isu politik, karena setiap menjelang pilkada menjadi salah satu isu yang hangat dibicarakan. Kabupaten Bone juga sama kedudukannya dengan Kabupaten Gowa menerapkan Otonomi Daerah (OTODA)

Salah satu faktor yang dapat mempercepat pembangunan untuk Kabupaten Gowa dan Kabupaten Bone perlu dilakukan pemekaran kabupaten, karena kedua daerah ini sangat berpotensi untuk dimekarkan baik berdasarkan luas daerah maupun berdasarkan jumlah penduduk, Kabupaten Gowa menempati jumlah penduduk urutan kedua setelah Kota Makassar dan Kabupaten Bone menempati jumlah penduduk urutan ketiga setelah kota Makassar.

Hasil kajian sistem pemerintahan antara Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone memberikan informasi bahwa pada prinsipnya kedua kerajaan sebelum kehadiran tomanurung sistem pemerintahannya menganut sistem desentralistik, pada Kerajaan Gowa dengan *bate salapang* berdaulat masing-masing di negerinya di bawah koordinasi *paccallaya*, demikian juga pada Kerajaan Bone dengan beberapa *matoa* yang masing-masing berkuasa di negerinya. Dengan kehadiran tomanurung menjadi raja pada kedua kerajaan tersebut, maka perlahan-lahan berubah dari sistem desentralistik menjadi sistem sentralistik, dan setelah Belanda datang sebagai penjajah di Indonesia, maka sistem pemerintahan sentralistik dilanjutkan, dan itulah melahirkan benih-benih *peodalisme* yang kita masih rasakan pada masa orde baru dan bahkan hingga saat ini masih ada pejabat atau kelompok masyarakat menumbuhkan sifat-sifat *feodalisme*, pada hal sudah dijelaskan dalam al Quran surat al Hujrat ayat 13, dan juga dalam *somboyang* negara Republik Indonesia yaitu *Bhinneka Tunggal Ika* (Sutasoma, 1365).

## **PENUTUP**

Berdasarkan hasil kajian dan analisis maka penelitian ini menyimpulkan sebagai berikut: (1) sistem pemerintahan Kerajaan Gowa pada awalnya menganut sistem desantralistik karena bate salapang mempunyai hak dan kewenangan mengatur daerahnya atau negerinya masing-masing, sedangkan paccallaya hanya berfungsi sebagai koordinatif. Namun setelah Kerajaan Gowa diperintah oleh Tomanurung sebagai Raja yang bergelar sombaya, maka sistem bate salapang dari penguasai negeri berubah menjadi pengabdian, dan cenderung bersifat sentralistik, (2) sedangkan sistem pemerintahan Kerajaan Bone menganut sistem sentralistik penuh karena mangkau sebagai pucuk pimpinan pemerintahan tidak memberikan kuasa kepada adat pitue sebagai pejabat pada tingkat gallarrang atau matoa-matoa pada setiap negeri dan kekuasaan dikendalikan langsung oleh mangkau sebagai raja, dan (3) hasil kajian menyimpulkan bahwa sistem pemerintahan Kerajaan Gowa pada awalnya identik sistem pemerintahan desantralistik yang kita kenal dengan sistem otonomi daerah saat ini, sedangkan sistem pemerintahan Kerajaan Bone identik dengan sistem pemerintahan sentralistik yang diterapkan pada masa orde baru. Dari kesimpulan tersebut, dapat ditarik benang merah bahwa sistem peodalisme bagi Kerajaan Gowa dan Kerajaan Bone yang terkadang masih ditemukan pada orang-orang tertentu adalah warisan dari Tomanurung dan warisan penjajah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Hadimuliono & Muttalib, A.M. (1979). Sejarah Kuno Sulawesi Selatan. Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Perbukala Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.
- Jurnal Walasuji Vol.10, No.2, desember (2019). Jurnal hubungan politik antara kerajaan Gowa, Bone, Soppeng, dan Wajo.
- Limpo, S.Y., Culla A.S., & Tika, Z. (1995). Profil Sejarah Budaya dan Pariwisata Gowa. Pemerintah Daerah Tingkat II, Gowa Kerjasama Dengan Yayasan Ekspone 1966, Gowa Sulawesi Selatan Indonesia.
- Malli, R. (2019). Pemahaman Masyarakat Gowa tentang nilai-nilai pendidikan islam yang terintegrasi dalam sarak sebagai unsur pangngadakkang di Kab Gowa. Jurnal Visipena Vol 10, No 2.
- Malli, R. (2019). Penerapn nilai-nilai pendidikan Islam dalam Sarak (syariat) Sebagai Unsur Pangngadakkang (tradisi) bagi masyarakat Gowa. Jurnal Tarbawi Vol 4 No 2.
- Mattulada (1982). Menyusuri Jejak Kehadiran Makassar dalam Sejarah. Bhakti Baru Berita Utama, Ujung Pandang, Indonesia.

- Mattulada (1985). Suatu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi Orang Bugis. Guru Besar Antropologi Universitas Hasanuddin dan Universitas Tadulako. Gadjah Mada University Yogyakarta, Indonesia
- Mukhlis dan Ribinson K. (1985). Agama dan Realitas Sosial. Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Poelinggomang, Edward I, dkk (2004). Sejarah Sulawesi Selatan Jilid I. Makassar: Badan penelitian dan pengembangan daerah (balibangda) provinsi Sulawesi Selatan.
- Rahman A.R. (1992). Nilai-Nilai Utama Kebudayaan Bugis. Hasanuddin University Press, Makassar
- Rapar, JH. (2002). Filsafat Politik; Plato, Aristoteles, Agustinus, Machiavenlli (Jakarta: Paradotama Wiragemilang).
- Sagimun M.D. (1986). Sultan Hasanuddin Menantang V.O.C. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Jakarta, Indonesia
- Sambu A. H. (2016). Sejarah Kajang. Yayasan Pemerhati Sejarah Sulawesi Selatan Indonesia. Lingkar Media Yogyakarta, Indonesia.
- Satria A. (2003). Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir. PT. Pustaka Cidesindo, Jakarta Selatan Indonesia.
- Zainuddin Tika, Lontarak Mangkasara. Ungkapan tentang kejujuran ini adalah dalam buku matthes, Makassarchhe Chrestomathie (Amsterdam: Gedrukt ED, 1992).